



Ahok ; Ruginya di Mana Bikin Pulau?

GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan reklamasi 17 pulau di kawasan utara Jakarta tetap akan dilakukan. Hal itu sesuai perintah di Keputusan Presiden (Keppres) tahun 1995 yang terbit di era Presiden Soeharto. "Jadi saat itu Pak Harto yang mengeluarkan Keppres. Nah 17 pulau ini hasil adalah Keppres tahun 1995," terangnya.

Dijelaskannya juga, untuk 17 pulau itu sebagian besar yang berinvestasi badan usaha milik daerah (BUMD). Lalu sisanya beberapa perusahaan yang berencana mereklamasi itu milik anak Pak Harto. "Lalu mereka sebagian kerja sama, hingga jatuhlah pada perusahaan ini. Yakni Pembangunan Jaya, Jakpro, Ancol, PT KEK. Itu semua punya kita. Jadi ada 7 atau 9 pulau itu punya BUMD," terang juga gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut ■



DOK/INDOPOS
Basuki Tjahaja Purnama

Sedangkan Sedayu Group, Podomoro Group, masih menurut Ahok juga, adalah grup yang dulu belum ada properti. "Mereka ini beli hak izin pulau ini," ungkapnya juga. Ahok juga menegaskan, reklamasi 17 pulau ini jangan disamakan dengan proyek Giant Sea Wall. Karena itu, merupakan dua hal yang berbeda.

"Banyak orang yang salah menduga. Giant Sea Wall itu bukan 17 pulau lho. Giant Sea Wall itu enggak ada hubungannya dengan 17 pulau ini. Giant Sea Wall itu di depannya. Itu pun kajiannya baru mau dikasih bantuan Belanda," tegas Ahok juga.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga memastikan, proyek reklamasi ini tak akan menimbulkan dampak lingkungan yang berlebihan. Selain itu, katanya, reklamasi 17 pulau ini juga akan menguntungkan DKI Jakarta.

"Kalau mau bilang ada dampak lingkungan, lebih bahaya PIK karena itu bakau. Dulu Pak Harto waktu mau mengeluarkan Keppres ini, dicantumkan jelas walaupun cuma 5 persen dikasih ke kita yang bisa dijual. Mereka wajib bantu mengatasi banjir di daratan. Padahal dia

enggak ada hubungan dengan daratan. Tapi justru dia menahan ombak. Sekarang saya mau tanya, ruginya di mana bikin pulau?," cetusnya juga.

Sebelumnya sejumlah pihak terus mempertanyakan kebijakan Gubernur Ahok menerbitkan izin reklamasi kawasan pesisir utara Jakarta. Lantaran rencana itu sempat diprotes Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Koordinator Indonesia For Transparency And Akuntability (INFRA), Agus Chaerudin mengatakan pembangunan mega proyek reklamasi 17 pulau buatan dengan luas 2.700 hektare itu master plannya memang sudah ada sejak era mantan Gubernur Sutiyoso. Tapi tak bisa terealisasi, karena diduga terdapat banyak pelanggaran sistematis dalam proyek itu.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan Pemprov DKI memang tidak dirugikan dengan terbitnya Pergub No 2238 Tahun 2014 terkait reklamasi. "Tetapi menguntungkan 17 perusahaan swasta itu. Sekali lagi saya tegaskan, harus ada kajian yang mendalam terkait pelaksanaan reklamasi lebih kurang 2.700 hektare lautan Teluk Jakarta itu," terangnya. (wok)